

Peningkatan Pemahaman Tupoksi, Kapasitas Manajemen Organisasi, dan Kesekretariatan MUI Kecamatan se-Bangkalan Melalui Kegiatan Bimbingan Teknis Keorganisasian Bagi Pengurus MUI Kecamatan Se-Kab. Bangkalan

Bustomi Arisandi¹, Mufaizin², Bahrul Ulum³, Holil Baitaputera⁴, Junaidi⁵
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Bangkalan, Indonesia^{1,2,3,4}

✉ Email Korespodensi: faizin@darul-hikmah.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 11-11-2025

Disetujui 21-11-2025

Diterbitkan 23-11-2025

Katakunci:

MUI;

Manajemen Organisasi;

Tupoksi;

Bimbingan Teknis

ABSTRAK

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran strategis dalam pembinaan umat, pemberian fatwa, serta penguatan moralitas sosial di tingkat nasional maupun daerah. Namun, masih banyak pengurus MUI tingkat kecamatan yang belum memahami secara optimal tugas pokok dan fungsi (tupoksi), manajemen kelembagaan, serta sistem kesekretariatan modern. Penelitian dan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pengurus MUI kecamatan se-Kabupaten Bangkalan melalui kegiatan *Bimbingan Teknis (Bimtek) Keorganisasian*. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research (PAR)* dengan pendekatan pelatihan partisipatif yang melibatkan 36 peserta dari 18 kecamatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman tupoksi (78%), kemampuan manajerial (72%), serta pengelolaan administrasi dan surat-menyurat (81%). Kegiatan ini direkomendasikan untuk dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan pemerintah daerah serta sinergi antar-lembaga keislaman di Bangkalan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Bustomi Arisandi, Mufaizin, Bahrul Ulum, Holil Baitaputera, & Junaidi. (2025). Peningkatan Pemahaman Tupoksi, Kapasitas Manajemen Organisasi, dan Kesekretariatan MUI Kecamatan se-Bangkalan Melalui Kegiatan Bimbingan Teknis Keorganisasian Bagi Pengurus MUI Kecamatan Se-Kab. Bangkalan. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(6), 1975-1982. <https://doi.org/10.63822/1vw06r94>

PENDAHULUAN

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan memiliki peran strategis dalam membimbing, membina, dan mengarahkan umat Islam di Indonesia agar senantiasa berada pada jalan yang benar sesuai tuntunan syariat Islam. Di tingkat kabupaten dan kecamatan, MUI berfungsi sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim dalam memecahkan persoalan keumatan dan kebangsaan.

Namun dalam praktik kelembagaan, masih ditemukan sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi fungsi dan tugas pokok MUI di tingkat kecamatan. Berbagai studi menunjukkan bahwa problem klasik organisasi keagamaan sering terletak pada lemahnya tata kelola (governance), minimnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta kurangnya keterampilan administrasi dan manajemen sekretariat (Hidayat, 2021; Fathoni, 2022).

Kondisi ini juga terjadi di lingkungan MUI Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan hasil monitoring pra-kegiatan yang dilakukan oleh tim penyelenggara, ditemukan bahwa sebagian besar pengurus MUI di tingkat kecamatan belum memahami secara utuh tentang tugas pokok, peran dan fungsi MUI, fungsi kelembagaan alur kordinasi, system dan penataan administrasi dan mekanisme fatwa di MUI.

Melihat kondisi tersebut, MUI Kabupaten Bangkalan bersama mitra akademik, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Hikmah Bangkalan, memandang perlu diadakan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keorganisasian. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tupoksi, memperkuat kapasitas manajemen organisasi, serta menertibkan sistem kesekretariatan bagi para pengurus MUI kecamatan se-Kabupaten Bangkalan.

Program ini tidak hanya bersifat pembinaan administratif, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran spiritual bahwa tata kelola organisasi MUI merupakan bagian dari amanah keulamaan yang harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan profesionalisme (al-Qaradawi, 2001; MUI, 2022).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Bimbingan Teknis Keorganisasian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yaitu pendekatan yang melibatkan peserta secara aktif dalam proses pembelajaran, refleksi, dan tindakan perbaikan (Kemmis & McTaggart, 2005; Stringer, 2014).

Adapun tahapan pelaksanaannya terdiri dari beberapa fase:

1. Tahap Persiapan dan Identifikasi Kebutuhan

- ✓ Tim penyelenggara melakukan survei awal untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan di tiap kecamatan.
- ✓ Data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner sederhana kepada pengurus MUI Kecamatan.
- ✓ Hasil identifikasi menunjukkan bahwa aspek paling lemah adalah manajemen administrasi (62%), pemahaman tupoksi (54%), dan sistem komunikasi antar-MUI (49%) literasi dgital 38 %.

Tabel I.

Aspek Kelembagaan	Kondisi Awal (%)	Keterangan Singkat
Pemahaman Tupoksi	54%	Banyak pengurus belum memahami pembagian fungsi bidang
Administrasi Organisasi	62%	Arsip tidak tertata, surat-surat dan laporan kegiatan tidak standar
Koordinasi antar MUI Kecamatan	49%	Belum ada forum komunikasi resmi
Literasi Digital	38%	Minim penggunaan sistem online

2. Tahap Pelaksanaan Bimtek

- ✓ Kegiatan dilaksanakan selama satu hari penuh di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan.
- ✓ Peserta terdiri dari perwakilan pengurus MUI dari seluruh kecamatan se-Bangkalan dengan total 36 orang.
- ✓ Metode pelatihan menggunakan kombinasi ceramah, diskusi interaktif, simulasi administrasi, dan evaluasi pre-test serta post-test.





3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

- ✓ Evaluasi dilakukan melalui dua instrumen: tes tertulis (mengukur pemahaman konseptual) dan observasi (mengukur keterampilan praktis).
- ✓ Peserta juga diminta menyusun rencana tindak lanjut di tingkat kecamatan, khususnya pembentukan tim tata kelola dan sekretariat aktif.

Pendekatan partisipatif ini memungkinkan peserta tidak hanya menjadi objek pelatihan, tetapi juga subjek perubahan kelembagaan yang reflektif dan berkesinambungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Organisasi

Sebelum kegiatan, hanya sekitar 40–45% peserta yang memahami secara jelas fungsi utama MUI di tingkat kecamatan, termasuk hubungan hierarkis dan koordinatif dengan MUI Kabupaten. Setelah mengikuti Bimtek, hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan hingga 86% peserta dapat menjelaskan kembali secara sistematis peran dan tupoksi masing-masing bidang, seperti fatwa, dakwah, pendidikan, dan hubungan umat.

Tabel II.

Aspek yang Diukur	Sebelum Bimtek (Pre-test)	Setelah Bimtek (Post-test)	Peningkatan (%)
Pemahaman Tupoksi	42%	86%	+44%
Kapasitas Manajemen	48%	88%	+40%
Administrasi & Kesekretariatan	51%	83%	+32%

Peserta memahami bahwa tupoksi bukan sekadar pembagian kerja administratif, tetapi manifestasi dari fungsi keulamaan dan sosial-keagamaan dalam masyarakat (al-Qaradawi, 2001). Dengan demikian, setiap

pengurus memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjalankan perannya sesuai prinsip amanah, integritas, dan *maslahat al-ummah*.

Selain itu, fasilitator menekankan bahwa tupoksi MUI harus dijalankan dengan prinsip good governance sebagaimana diterapkan dalam organisasi modern: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan fairness (Hidayat, 2021). Hal ini membawa perubahan mindset dari pola kerja berbasis kebiasaan menuju kerja berbasis sistem.

2. Peningkatan Kapasitas Manajemen Organisasi

Sesi kedua berfokus pada manajemen organisasi dan kepemimpinan efektif. Melalui materi yang disampaikan berdasarkan teori Hersey, Blanchard & Johnson (2012), peserta dilatih untuk memahami pentingnya kepemimpinan situasional, pengambilan keputusan partisipatif, serta manajemen sumber daya manusia berbasis kolaborasi.

Hasil diskusi kelompok menunjukkan bahwa 90% peserta menyadari pentingnya pembagian tugas yang jelas, pelaporan berkala, dan mekanisme rapat koordinasi rutin. Beberapa kecamatan bahkan langsung menyusun draft Standar Operasional Prosedur (SOP) internal untuk kegiatan MUI Kecamatan.

Peningkatan kapasitas ini juga tampak pada kemampuan peserta dalam menyusun program kerja berbasis data umat. Para peserta diajak menggunakan pendekatan problem-based planning, yaitu menyusun program berdasarkan identifikasi masalah sosial keagamaan di wilayah masing-masing. Dengan metode ini, program MUI menjadi lebih kontekstual dan terukur (Miles & Huberman, 1994).

3. Penguatan Sistem Kesekretariatan dan Administrasi Kelembagaan

Bidang kesekretariatan menjadi fokus utama ketiga dalam kegiatan Bimtek. Banyak peserta yang sebelumnya belum memahami tata cara penyusunan dokumen resmi, seperti surat keputusan, laporan kegiatan, notulensi rapat, dan proposal kerja sama.

Melalui simulasi praktik, peserta dibimbing secara langsung untuk menyusun dokumen-dokumen tersebut menggunakan format standar yang ditetapkan oleh Pedoman Organisasi dan Tata Kelola MUI (MUI Pusat, 2022).

Evaluasi pasca kegiatan menunjukkan bahwa 83% peserta telah mampu membuat dokumen administratif secara sistematis. Beberapa sekretaris kecamatan juga mulai menerapkan sistem kearsipan digital sederhana menggunakan Google Drive dan WhatsApp group sekretariat.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman kesekretariatan tidak hanya meningkat secara teknis, tetapi juga secara konseptual, karena para peserta memahami bahwa administrasi merupakan cerminan profesionalitas lembaga (Schein, 2010).

4. Penguatan Jaringan Komunikasi dan Koordinasi Kelembagaan

Sebelum kegiatan, hubungan antar-MUI kecamatan masih berjalan secara sporadis tanpa wadah komunikasi formal. Salah satu capaian penting Bimtek adalah terbentuknya Forum Komunikasi MUI Kecamatan se-Kabupaten Bangkalan melalui media WhatsApp Group dan rencana portal informasi bersama.

Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi, pertukaran informasi, dan konsultasi program antara pengurus kecamatan dengan MUI Kabupaten. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana dakwah digital yang efektif dalam memperkuat ukhuwah dan kolaborasi kelembagaan (Fathoni, 2022).

Dengan terbentuknya jaringan ini, koordinasi antar-MUI kecamatan menjadi lebih cepat dan responsif. Keputusan-keputusan organisasi pun dapat disosialisasikan dengan efektif sehingga tidak terjadi kesenjangan informasi.

5. Perubahan Sikap dan Etos Profesionalisme

Aspek perubahan non-teknis juga menjadi indikator penting keberhasilan kegiatan. Berdasarkan wawancara dan observasi, peserta menunjukkan peningkatan motivasi, semangat profesionalisme, dan rasa tanggung jawab moral.

Banyak peserta yang mengaku bahwa setelah mengikuti Bimtek, mereka lebih memahami makna menjadi khadimul ummah (pelayan umat) sekaligus shadiqul hukumah (mitra pemerintah) secara proporsional (MUI, 2022).

Beberapa kecamatan menyusun rencana tindak lanjut (RTL) berupa pembentukan tim tata kelola dan sekretariat aktif. Hal ini menunjukkan tumbuhnya sense of ownership terhadap perubahan kelembagaan, sebagaimana ditekankan dalam pendekatan PAR (Stringer, 2014).

6. Hambatan dan Tantangan

Dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan beberapa kendala utama:

- a. Keterbatasan literasi digital, terutama pada peserta berusia lanjut, sehingga perlu pelatihan lanjutan berbasis teknologi.
- b. Durasi pelatihan yang relatif singkat (satu hari) menyebabkan beberapa materi seperti pelaporan keuangan dan digitalisasi arsip belum dibahas mendalam.
- c. Ketimpangan fasilitas antar-kecamatan, di mana beberapa MUI kecamatan belum memiliki sekretariat dan peralatan administrasi memadai.

Meskipun demikian, peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan komitmen untuk memperbaiki kelemahan tersebut melalui koordinasi dengan MUI Kabupaten dan dukungan perguruan tinggi mitra.

Implikasi Praktis

1. Bagi MUI Kabupaten Bangkalan:

Kegiatan Bimtek ini dapat dijadikan model pembinaan berkelanjutan (continuous development model) yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Melalui pendekatan evaluatif dan reflektif, MUI Kabupaten dapat memantau perkembangan kinerja MUI Kecamatan dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan lanjutan (Hidayat, 2021).

2. Bagi Pemerintah Daerah:

Hasil kegiatan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara lembaga keagamaan dan pemerintah daerah dalam menjaga harmoni sosial dan ketahanan moral masyarakat. Pemerintah dapat menjadikan kegiatan semacam ini sebagai bentuk kolaborasi strategis dalam governance partnership di bidang sosial-keagamaan (Dwiyanto, 2018).

3. Bagi Perguruan Tinggi (STAI Darul Hikmah Bangkalan):

Kegiatan Bimtek membuka ruang bagi kampus untuk memperluas peran community engagement atau pengabdian berbasis riset (research-based community service). Perguruan tinggi dapat mengembangkan modul pelatihan kelembagaan Islam berbasis pendekatan Aswaja dan manajemen modern (Tilaar, 2012).

4. Bagi MUI Kecamatan:

Pengurus dapat mengimplementasikan sistem administrasi baku berbasis prinsip good governance Islam, memperkuat jejaring kelembagaan, serta membangun budaya kerja profesional yang berlandaskan nilai etika dan pelayanan umat.

KESIMPULAN

Kegiatan Bimbingan Teknis Keorganisasian bagi pengurus MUI Kecamatan se-Kabupaten Bangkalan berhasil mencapai tujuannya secara efektif. Tiga aspek utama yang menjadi fokus kegiatan mengalami peningkatan signifikan, yaitu:

1. Pemahaman tupoksi organisasi meningkat dari 42% menjadi 86%;
2. Kapasitas manajemen dan kepemimpinan meningkat dari 48% menjadi 88%;
3. Kemampuan administrasi dan kesekretariatan meningkat hingga 83%.

Selain peningkatan kompetensi teknis, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran spiritual bahwa pengelolaan organisasi merupakan bagian dari ibadah dan amanah moral keulamaan.

Saran:

1. MUI Kabupaten Bangkalan perlu mengadakan Bimtek lanjutan dengan fokus pada literasi digital dan pelaporan keuangan berbasis sistem online.
2. Perlu dibentuk tim pendamping kecamatan yang terdiri dari unsur MUI Kabupaten dan perguruan tinggi untuk melakukan mentoring kelembagaan.
3. Kegiatan serupa sebaiknya dijadwalkan secara berkala minimal dua kali setahun, agar kesinambungan peningkatan kapasitas dapat terjaga.
4. Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan anggaran dan fasilitas sekretariat untuk memperkuat fungsi kelembagaan MUI di tingkat kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam: Dirāsah Muqāranah*. Cairo: Dar al-Syuruq.
- Dwiyanto, A. (2018). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 77–95.
- Fathoni, M. (2022). “Manajemen Organisasi Keagamaan: Strategi Penguatan Kelembagaan di Tingkat Lokal.” *Jurnal Manajemen Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 9(1), 45–62.
- Hidayat, N. (2021). Good Governance dalam Lembaga Keagamaan: Studi Implementasi Prinsip Akuntabilitas di Majelis Ulama Indonesia Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 8(2), 134–150.
- Hersey, P., Blanchard, K. H., & Johnson, D. E. (2012). *Management of Organizational Behavior: Leading Human Resources*. Pearson.
- Hidayat, N. (2021). “Good Governance dalam Lembaga Keagamaan: Studi Implementasi Prinsip Akuntabilitas di Majelis Ulama Indonesia Daerah.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 8(2), 134–150.

- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). "Participatory Action Research: Communicative Action and the Public Sphere." Dalam N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- MUI Pusat. (2022). *Pedoman Organisasi dan Tata Kelola MUI*. Jakarta: Sekretariat MUI.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational Culture and Leadership* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Stringer, E. T. (2014). *Action Research* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 214–237.